

DIRESMIKAN PPAB di KALIDADAP

Kebutuhan Air Tak Dapat Ditawar-tawar



Bupati Bantul meresmikan PPAB di Kalidadap 1 Imogiri.

BANTUL (KR) - Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, meresmikan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (PPAB) 2023 dan launching PPAB tahun anggaran 2024 di Kalidadap I Selopamiro Imogiri Bantul, Senin (5/2).

Bupati mengemukakan, air merupakan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat. Karena itu sudah seharusnya pemenuhan dan penyediaan air bersih dilaksanakan dengan memperhatikan kuantitas, kualitas dan terjangkau, baik secara jarak, biaya serta berkelanjutan atau terus-menerus tidak berbatas waktu untuk menuju kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera.

2023 Pemkab Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul, telah membangun sumur bor dan jaringan air bersih di 8 lokasi pada 8 kalurahan dengan anggaran dana Rp 986.600.000. Yakni di Kebosungu I Dlingo, Seropan I dan Banjarharjo I Muntuk Cempluk dan Kanigoro Mangunan. Karangkulon Wukirsari, Kalidadap I Selopamiro, Bodon dan Jagalan.

rencanakan melaksanakan pembangunan penyediaan air bersih di 13 titik pada 10 kalurahan dengan anggaran dana Rp 1.675.800.000.

"Semoga ini semua akan membawa manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bantul dalam upaya penyediaan air bersih yang sehat dan berkualitas. Karena air adalah salah satu hal mendasar yang harus dicukupi dan tidak dapat ditawar-tawar

lagi," ungkap Bupati. Sementara Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul, Drainase Sri Nuryanti MSI, mengatakan setelah pembangunan sumur bor dan jaringan air bersih Tahun Anggaran 2023 diselesaikan, pada saat ini sudah langsung dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar lokasi, mengingat air merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap saat. "Semoga hasil pembangunan ini dapat dikelola dan dikembangkan sebaik-baiknya oleh Kelompok Pengelola Air Bersih," pungkasnya. (Jdm)-f

Menurut Halim, tahun Untuk tahun 2024 di-

ATASI MASALAH SAMPAH

DLH Tempuh Langkah Strategis

BANTUL (KR) - Sampah hingga kini masih menjadi persoalan serius di Bantul. Sejumlah langkah diambil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul untuk mengurai persoalan tersebut. Termasuk mengerahkan puluhan armada pengangkut sampah agar persoalan tersebut perlahan mendapatkan solusi terbaik.

"Khusus untuk pengangkut sampah sekarang ini kita operasional sekitar 39 unit armada. Jika melihat kondisi saat ini, armada kita masih cukup," ujar Kepala DLH Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho ST MSc, Minggu (4/2).

Sehingga dalam tahun anggaran 2024, DLH terus mengoptimalkan ketersediaan armada pengangkut sampah yang sudah ada. Tentu sambil menjaga dengan melakukan perawatan komponen agar berfungsi dengan baik. "Kita terus berbe-

nah, karena armada yang kita punya berumur lima tahun sehingga masih bagus," ujarnya.

Tahun 2024 ini, DLH Kabupaten Bantul tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur dan sarana pengolahan sampah. Termasuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) di kalurahan di Bantul.

"Tahun ini kita fokuskan dalam membangun infrastruktur, karena terpenting ialah bagaimana sampah tersebut harus diolah. Sehingga sampah yang dibawa ke TPA berkurang," ujarnya. Dengan langkah langkah tersebut, sampah bisa diselesaikan di tingkat kabupaten dan meminimalkan pembuangan ke TPA.

Ari mengatakan, tahun ini juga dibangun TPST di wilayah Dingkikan, Sedayu, kemudian TPST di wilayah Banguntapan. (Roy)-f

Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Pemilu 2024

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul menyelenggarakan *training of trainer* (TOT) bagi saksi peserta Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Bantul, diikuti perwakilan saksi, baik dari partai politik, calon DPD, serta tim kampanye capres-cawapres.

Narasumber dalam TOT ini antara lain Bambang E Cahya (Ketua Bawaslu RI tahun 2011-2012), Hamdan Kurniawan (Mantan Ketua KPU DIY) serta Sri Rahayu Werdingsih (Mantan Anggota Bawaslu DIY).

Menurut Kordiv SDMO Bawaslu Bantul Sri Hartati, Senin (5/2), pasca TOT di tingkat kabupaten akan dilanjutkan dengan pelatihan saksi tingkat kecamatan, dengan mengundang perwakilan saksi semua pe-

serta Pemilu di tingkat kecamatan.

Materi dalam pelatihan saksi ini adalah peran dan fungsi saksi, isu-isu krusial dalam pemungutan, penghitungan suara, penegakan hukum dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menambahkan Bawaslu wajib melaksanakan pelatihan saksi sesuai ketentuan Pasal 351 ayat 8 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Melalui pelatihan saksi ini diharapkan peserta pemilu memahami posisi penting saksi yang harus mengawal proses pemungutan sampai dengan penghitungan suara selesai.

Lebih lanjut diungkapkan, nantinya saksi peserta Pemilu yang akan ditempatkan di TPS ini diharapkan

paham akan regulasi pemungutan dan penghitungan suara. "Dalam ketugasan sebagai saksi, mereka dapat mengajukan keberatan apabila ditemukan ada hal yang kurang sesuai dengan prosedur," paparnya.

Ditegaskan, saksi dapat menyampaikan keberatannya kepada pengawas TPS untuk ditindaklanjuti kepada KPSS yang bertugas. "Saksi juga diminta mengikuti semua proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai, hal ini penting karena apabila terjadi permasalahan maka saksi dapat segera menyampaikan pendapatnya kepada KPSS maupun PTSP. Termasuk menandatangani dan menerima berita acara hasil serta sertifikat hasil di tingkat TPS," pungkasnya. (Jdm)-f

Independensi LBH untuk Jaga Integritas

BANTUL (KR) - Pusat bantuan hukum, baik di Australia maupun Indonesia memiliki fungsi yang sangat esensial dalam tatanan masyarakat sebagai fasilitas yang dapat mereka gunakan kapanpun untuk mengadvokasikan berbagai kepentingan publik.

Karenanya independensi lembaga hukum menjadi penting sebagai salah satu jaminan terjaminnya integritas yang menjadi inti dari sebuah lembaga penyedia layanan hukum. Hal ini ditegaskan Director of Monash Law Clinics, Prof Joel Townsend, dalam diskusi di FH UMY, Jumat (2/2) sore.

Menurutnya, keberadaan pusat bantuan hukum bagi masyarakat, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bersifat independen seringkali dianggap sebagai alternatif layanan hukum bagi masyarakat. Pakar Pendidikan Pengalaman Hukum dari Monash University Australia ini menyebut, akan menjadi sangat buruk jika sebuah badan hukum kehilangan independensinya. Sifat dari LBH yang independen dan tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah ini, menurut Joel berbeda dengan pusat bantuan hukum yang ada di Australia, dimana lembaga yang dikenal sebagai legal aid center merupakan bagian dari pemerintah.

"Walaupun kestabilan finansial dari legal aid center di Australia lebih terjamin, menurut saya risiko yang dihadapi pun tidaklah kecil dalam mempertahankan integritas dan etika. Jika suatu waktu legal aid

center di Australia menyelesaikan litigasi dengan proses yang buruk, maka pemerintah akan mengintervensi dan mengurangi tingkat independensi dari legal aid center tersebut," tambahnya.

Apresiasi juga disampaikan Joel kepada para praktisi bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Menurutnya, Australia juga memiliki beberapa jenis pusat bantuan hukum dan salah satu yang serupa dengan LBH adalah organisasi berbasis masyarakat. Pendanaan didapat dari banyak sumber dan menjadikannya leluasa untuk melayani masyarakat di lingkup kepentingan publik.

Sedang wakil LBH Yogyakarta, Putri, menggarisbawahi independensi dari LBH. Menurutnya, LBH tidak akan dapat melakukan proses litigasi atas kepentingan publik secara bebas jika mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.

"Ada banyak kasus kriminalisasi yang ditangani oleh pengacara di bidang kepentingan publik demi tercapainya resolusi atas kepentingan publik. Dan walaupun berstatus independen namun tetap berusaha diintervensi oleh pemerintah. Kami di LBH pun memiliki kendala tersendiri, terutama dengan banyaknya pengacara yang lebih ingin menangani litigasi di ranah hukum privat jika dibandingkan dengan pengacara yang ingin memproses litigasi di ranah hukum yang menyangkut kepentingan publik," ungkap Putri. (Fsy)-f

4 PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4 RIZAL RINALDI
5
6 SATSET DASDES!
7
8 UNTUK
9 JOGJA ISTIMEWA
RIZAL RINALDI
CALEG DPR RI PARTAI GOLKAR DAPIL D.I YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA, SLEMAN, KULON PROGO, BANTUL, GUNUNG KIDUL
rizalrinaldi2024 Rizal Rinaldi

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id
Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.

Korban Penipuan Penggandaan Uang Bertambah



Pelaku penipuan berkedok dukun penggandaan uang.

BANTUL (KR) - Korban penipuan berkedok penggandaan uang yang dilakukan tersangka NF (44) warga Lumajang Jawa Timur, bertambah. Korban kedua yakni WB (37) warga Piyungan Bantul. Sebelumnya korban yang melapor ke Polsek Piyungan yakni RW (47) juga warga Piyungan. Jumlah uang dari penipuan mengaku sebagai dukun penggandaan uang yang dikantongi NF mencapai Rp 432 juta.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana, Senin (5/2), menjelaskan korban pertama warga Piyungan pada bulan Mei 2019, diminta uang oleh pelaku Rp 1,2 juta sebagai contoh untuk dimasukkan ke dalam kotak sebanyak 12 buah. Pelaku mengatakan kepada korban, nantinya dalam setiap kotak akan menjadi Rp 7 miliar.

Karena korban tergiur kata-kata pelaku, akhirnya korban menuruti. Setelah hampir 3 tahun, korban menanyakan uangnya sudah bertambah belum. Tapi pelaku selalu menyuruh korban untuk bersabar hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024. Setelah kotak dibuka ternyata uangnya kosong diambil pelaku dan dipakai untuk kepentingan pribadi pelaku.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi berhasil membekuk NF (44) di Denpasar Bali pada Senin (29/1) lalu. Laki-laki berbadan gempal ini, ditangkap Tim Opsnal Polres Bantul bersama Unit Reskrim Polsek Piyungan.

Untuk menipu terhadap korban ke dua modusnya juga sama yakni, korban diminta menyediakan kardus yang setiap bulan disuruh mengisi uang. Tapi uang tidak bertambah, kotaknya malah diambil pelaku. (Jdm)-f